



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS PADJADJARAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ATWAR BAJARI
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG PEMBELAJARAN, KEMAHASISWAAN DAN RISET
3. NHK : 141510

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.462.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m<sup>2</sup>/80 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m<sup>2</sup>/50 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m<sup>2</sup>/90 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Tanah Seluas 60 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 62.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 626.000.000

1. MOTOR, YAMAHA BK 6 R M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV HRV A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. MOBIL, HONDA BRV BRV PRESTIGE AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 305.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO BRIO MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 7.600.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 843.173.470**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 2.938.773.470



III. HUTANG

Rp. 169.392.987

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.769.380.483

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.